

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peran Wanita

Secara umum wanita mempunyai tiga fungsi utama yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan dan perannya sebagai ibu rumah tangga yaitu fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan fungsi produksi. Fungsi reproduksi dihubungkan dengan hak, kewajiban dan kodrat wanita. Fungsi sosialisasi berkaitan erat dengan fungsi dan tanggung jawab wanita dalam mempersiapkan anak-anaknya masuk dalam pergaulan luas. Fungsi produksi berkaitan erat dengan fungsi ekonomis, dimana sejalan dengan kemajuan zaman dan meningkatnya pendidikan kaum wanita memungkinkan kaum wanita tidak saja berperan secara tidak langsung tetapi dapat mengambil peran langsung dalam proses pembangunan sesuai kemampuannya (Mamik Indriyani, 1997:24).

Hal senada juga tercantum dalam TAP MPR No.IV/ MPR/ 1999 tentang GBHN BAB IV yang menyatakan bahwa :

- a. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesehatan dan keadilan gender.
- b. Meningkatkan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai historis perjuangan kaum perempuan,

dalamn rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dalam masyarakat (www.jurnalskripsi.com/10/29, 2007).

Panca Dharma Wanita menyebutkan bahwa ibu rumah tangga mempunyai fungsi :

- a. Wanita sebagai penerus keturunan
- b. Wanita sebagai isteri
- c. Wanita sebagai pendidik anak
- d. Wanita sebagai pengurus rumah tangga
- e. Wanita sebagai warga negara

Panca dharma tersebut menunjukan peran wanita untuk kegiatan rumah tangga dan masyarakat yang bersifat sosial dan satu dharma yang memberikan peluang bagi wanita untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, baik bekerja di rumah maupun di luar rumah. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga banyak menentukan pada membangun dan menampilkan keluarga yang bahagia, yang berkedudukan sebagai ibu yang melahirkan anak, wanita dengan kekhususannya secara psikologis sangat cocok untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya karena pada umumnya ibu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, oleh karena itu ibu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai pendidik anak-anak (Singarimbun,1983:26).

Peran ibu di samping sebagai pemelihara rumah tangga yang mempunyai tugas-tugas tidak kalah penting dengan pria sebagai bapak

banyak yang masih bekerja di luar tugas domestik guna menambah pendapatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran wanita bukan hanya sebagai pelengkap yang bertugas mengabdikan pada suami dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak-anaknya. Kondisi yang demikian berarti wanita mempunyai kedudukan ganda yang harus dapat dijalankan secara bersamaan.

Pekerjaan rumah tangga yang menyita waktu banyak, tidak boleh ditinggalkan meskipun seorang wanita terjun pula dalam kegiatan ekonomi. Sebagai konsekuensinya kaum wanita yang bekerja, khususnya di pedesaan harus benar-benar bisa membagi waktu. Dikatakan pula dalam modul pelatihan kader pendidikan keluarga (1996:6), seorang ibu mempunyai peran sebagai isteri, ibu, pengurus rumah tangga dan pendamping hidup. Meskipun dalam sejarah, nilai, fungsi dan peranan ibu dalam rumah tangga berubah seiring dengan bergesernya kebudayaan dan tingkat sosial ekonomi pada zamannya namun fungsi dan peranan ibu secara esensial adalah tetap yaitu sebagai pengurus rumah tangga. Oleh karena itu, ibu yang bekerja harus bisa membagi tugas secara baik. Dalam hal ini Pudjiwati Sajogya (1985:23) menyimpulkan bahwa waktu yang dicurahkan ibu untuk pekerjaan rumah tangga relatif banyak. Untuk sebagian besar rumah tangga khususnya dari golongan ekonomi lemah, pekerjaan itu memerlukan banyak waktu dan energi disebabkan kurangnya fasilitas dan teknologi dan hal itu adalah umum dalam rumah tangga pedesaan.

Menurut Endang Mulyani (2002:2), seorang ibu agar dapat menjalankan peranan majemuk dan terbiasa dengan tugas-tugas yang baru dapat dilakukan berbagai upaya :

- a. Peningkatan kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketahanan mental dan spiritual agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan segenap kehidupan kegiatan pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan serta mampu menghadapi perubahan di dalam masyarakat.
- b. Dibutuhkan latihan-latihan dan ketrampilan-ketrampilan yang berpusat pada pengembangan diri, pemupukan kepercayaan diri, bertindak assertif di samping ketrampilan berorganisasi, mengerakan masyarakat, berusaha mudah berkomunikasi, mengusahakan berbagai kegiatan. Dengan demikian wanita tidak selalu menjadi objek kegiatan, tetapi menjadi subjek kegiatan.
- c. Iklim sosial budaya perlu dikembangkan agar lebih mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita sehingga makin dapat berperan aktif dalam masyarakat dan dalam lingkungan keluarga secara selaras dan serasi.

2. Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Ekonomi Keluarga

Partisipasi menurut kamus besar bahasa indonesia (2003:831) adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut Hugo F. Reading (1986:193) dalam kamus ilmu sosial, menyebutkan bahwa partisipasi (objektif) adalah tingkat pengaruh aktual seorang anggota kelompok terhadap proses pengambilan keputusan. Partisipasi menurut Tatik Yoga Tursila (1994:4) adalah merupakan keikutsertaan, keterlibatan, kemauan individu atau masyarakat baik mental, emosi maupun fisik dalam suatu usaha atau aktivitas untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah peran serta, keterlibatan, kemauan individu atau masyarakat dalam suatu usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Peran serta atau partisipasi wanita dalam rumah tangga menurut Oppong & Chruch dalam Ken Suratiyah (1990:9) dapat ditinjau dari segi aktivitas, alokasi waktu, pengetahuan/ ketrampilan, pendapatan dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Tatik Yoga Tursila (1994:3), partisipasi dapat diukur dari besarnya sumbangan pendapatan terhadap pendapatan keluarga, curahan waktu untuk keluarga dan curahan waktu untuk bekerja di luar rumah.

Berita resmi statistik tahun 2007 menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita masih di bawah pria. Hal ini dibuktikan dengan TPAK wanita yang baru mencapai 49,52 persen dibandingkan dengan TPAK pria yaitu 83,68 persen pada bulan Februari 2007. Jika dilihat dari sisi gender, sekitar 35,20 persen tenaga kerja wanita bekerja dengan status tidak dibayar. Sementara sekitar 27,53 persen tenaga kerja laki-laki bekerja dengan status buruh/ karyawan. Hal ini menandakan, walaupun terjadi peningkatan tenaga kerja perempuan, namun masih dalam kegiatan informal yang berarti pula sangat mudah berpindah pekerjaan ke sektor lain dimasa yang akan datang (www.bps.go.id, 2007).

Rendahnya partisipasi wanita khususnya ibu rumah tangga dalam angkatan kerja ini, ada beberapa faktor penyebabnya antara lain karena belum adanya iklim sosial yang mendukung yaitu masih adanya anggapan bahwa wanita hanya pantas sebagai ibu rumah tangga yang perannya di dalam rumah dan tidak pantas apabila bekerja di luar rumah. Di samping itu, rendahnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja antara lain juga di pengaruhi oleh kualitas wanita itu sendiri, dimana tingkat pendidikan dan pengetahuan, ketrampilan serta keahlian yang dimiliki wanita terutama yang tinggal di pedesaan masih rendah, sehingga mereka kalah bersaing di dalam mencari pekerjaan dibandingkan dengan kaum pria. Akibat tingkat pendidikan dan pengetahuan, ketrampilan serta keahlian yang rendah mempengaruhi partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Dimana hanya

terkumpul pada jenis pekerjaan yang tidak menuntut persyaratan pendidikan dan pengetahuan, ketrampilan serta keahlian yang tinggi.

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi wanita berumur 15 tahun ke atas dikarenakan ibu rumah tangga tidak termasuk sebagai angkatan kerja. Pekerjaan wanita dianggap sebagai ibu rumah tangga yang tidak produktif yang memiliki banyak waktu luang yang seharusnya mereka gunakan secara lebih efisien. Apa yang dikerjakan dianggap tidak bernilai. Produksi nilai guna di luar sistem moneter dilihat sebagai tidak penting, tetapi pekerjaan dengan nilai tukar (yaitu, uang) baru dianggap produktif (Ratna S. dan Brigitte H, 1997:22). Kondisi ini terbentuk dan tersosialisasi sebagai suatu hal yang wajar dalam lingkungan sosial ekonomi kita bahkan oleh kaum ibu itu sendiri, hal ini karena ibu tidak pernah dipertimbangkan sebagai pencari nafkah. Ini menempatkan ibu rumah tangga menjadi warga kelas dua, jauh dari akses informasi, akses sumber daya dan kesempatan berkembang terutama bidang ekonomi (Neski Triwindiyati, 2003:2).

Tingkat sosial ekonomi keluarga banyak dipengaruhi oleh tingkat partisipasi wanita, khususnya ibu rumah tangga yang mencari tambahan penghasilan. Dalam hal ini justru banyak terjadi pada masyarakat wanita pedesaan, khususnya terjadi pada ibu rumah tangga miskin di pedesaan. Mereka tergolong ulet dalam mengupayakan perekonomian rumah tangganya. Ibu rumah tangga di pedesaan dari golongan berpenghasilan rendah tidak ada pilihan lain untuk ikut mendapatkan tambahan

penghasilan. Seperti halnya pendapat I Wayan Yogi Swara dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di Klungkung, Bali tahun 1993. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara keseluruhan pendapatan total rumah tangga petani rumput laut di Desa Ped, berasal dari sektor pertanian 78 persen dan sektor non pertanian 22 persen. Dari pendapatan tersebut, ibu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari pada bapak. Bapak menghasilkan 7,7 persen dan ibu menghasilkan 17,2 persen dari total pendapatan rumah tangga (Warta Studi Perempuan Vol 4 No 1, 2003).

Menurut Tjiptoherjiyanto dalam makalah Ratna P. Tjaja (2000:4), mengatakan bahwa peningkatan persentase wanita kerja disebabkan oleh dua faktor utama yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan. **Pertama**, dari sisi penawaran tersebut disebabkan oleh semakin membaiknya tingkat pendidikan wanita dan disertai pula dengan menurunnya angka kelahiran. Hal tersebut didorong pula oleh kondisi makin besarnya penerimaan sosial atas wanita yang bekerja diluar rumah. **Kedua**, dari sisi permintaan, perkembangan perekonomian (dari sisi produksi) memerlukan tenaga kerja wanita seperti industri tekstil dan garmen. Sedangkan fenomena lain yang makin mendorong masuknya wanita ke lapangan kerja adalah makin tingginya biaya hidup bila hanya ditopang satu penyangga pendapatan keluarga (*one earner household*).

Ony S. Prijono (1996:211) dalam bukunya yang berjudul pemberdayaan wanita sebagai mitra sejajar pria, juga mengatakan bahwa banyak wanita mencari kerja dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, membiayai pendidikan dan keperluan keluarganya.

Tingkat partisipasi kerja wanita yang meningkat juga disebabkan oleh : (a). Jumlah wanita yang berpendidikan makin bertambah, (b). keberhasilan program KB mengakibatkan waktu wanita untuk mengurus anak dan rumah tangga berkurang, (c). Kemajuan teknologi telah dan akan terus membuka peluang yang lebih besar bagi wanita untuk bekerja, (d). Pola produksi dan struktur jabatan terus berubah, (e). perubahan terhadap nilai akan terus berkembang mengenai pekerjaan wanita, (f). Kebutuhan keluarga terus meningkat (Antho Mudzhar, 2004: 189).

Nampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peranan wanita khususnya ibu rumah tangga tidak bisa dipisahkan dari peran dan kedudukan mereka dalam keluarga. Mengingat dimasa lalu, wanita lebih banyak terkungkung dalam peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak. Namun seiring dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya pendidikan wanita maka ibu rumah tangga dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai manajer rumah tangga, tetapi juga ikut berkarya di luar rumah.

3. Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pengertian UKM menurut Inpres No 10/1999, usaha menengah adalah suatu unit usaha dengan asset netto (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp. 200 juta hingga Rp. 10 milyar, di atas itu adalah usaha besar. Sedangkan kriteria usaha kecil mengacu pada UU No 9 tahun 1995 yang dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimiliki bahwa usaha kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai asset netto (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak melebihi Rp. 200 juta, atau penjualan per tahun tidak lebih dari 1 milyar.

Menurut BPS dalam Tulus TH Tambunan (2002:49), pengertian UKM dilihat dari jumlah pekerja bahwa kriteria usaha kecil adalah suatu unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. Unit-unit usaha tanpa pekerja (*self-employment*) termasuk dalam kategori ini. Sedangkan usaha menengah adalah unit usaha dengan jumlah pekerja diatas 20-95 orang.

Sartika Partomo (2002:15) menyebutkan bahwa kriteria umum UKM dapat dilihat dari ciri-ciri yang pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut : (a). Struktur organisasi sederhana, (b). Tanpa staf yang berlebihan, (c). Pembagian kerja yang kendur, (d). Memiliki hirarki manajerial yang pendek, (e). Aktivitas yang sedikit formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan, (f). Kurang membedakan asset pribadi dan perusahaan.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu usaha di sektor informal. Timbulnya sektor informal sebagai sumber kesempatan kerja merupakan manifestasi tidak sebandingnya pertumbuhan angkatan kerja pada satu pihak dan ketidakmampuan sektor formal untuk menampung kelebihan tenaga kerja dilain pihak. Berkurangnya kesempatan kerja pada sektor formal, tidak mengurangi semangat wanita untuk berperan dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarganya, dan sektor yang sekiranya masih dapat dijangkau oleh mereka adalah sektor informal. Karena dalam sektor ini tidak memerlukan persyaratan pendidikan dan ketrampilan yang tinggi, sehingga mudah dimasuki kaum wanita (Winarno, 2000:18).

Keterlibatan wanita khususnya ibu rumah tangga dalam sektor informal sangat menonjol sehingga tampak bahwa sektor informal didominasi kaum wanita. Sehingga membicarakan masalah sektor informal tanpa melibatkan wanita agak timpang karena dengan caranya yang unik ternyata sangat berperan dalam sektor ini. Hal senada dikatakan oleh Tulus TH. Tambunan (2002: 85), yang mengatakan bahwa jumlah perempuan yang terlibat sebagai wirausaha di UKM, khususnya usaha kecil cukup signifikan baik sebagai pemilik atau sebagai usaha bersama dengan suami. Kewirausahaan perempuan memiliki tradisi yang kuat terutama disektor perdagangan kecil, industri makanan dan minuman, pakaian jadi, batik dll. Kebanyakan perempuan pengusaha terlibat dalam tugas administrasi (54%), sedangkan pengusaha laki-laki sering bekerja

sebagai tenaga ahli. Hasil yang sama ditemukan, jika melihat pada posisi pasangan yang membantu dalam menjalankan usahanya. Kebanyakan isteri yang menolong suaminya (36%) bertanggung jawab untuk keuangan, sedangkan suami-suami yang menolong isterinya lebih dipakai untuk pemasaran.

Jika membicarakan sektor informal khususnya industri rumah tangga pangan maka tidak lepas dari kaum wanita. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tugas utama wanita dalam peran domestik, salah satunya adalah masalah penyediaan makanan. Berkaitan dengan industri rumah tangga pangan, Ratna S. dan Brigitte H. (1997:320) mengatakan bahwa yang biasanya terlibat dalam pengolahan makanan adalah perempuan. Dalam beberapa kasus penelitian yang mereka lakukan disebutkan pula bahwa produksi makanan merupakan aktivitas sampingan yang mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi perusahaan, tetapi sumber utama pendapatan keluarga adalah pertanian. Dalam kasus lain, pertanian merupakan aktivitas sampingan, sedangkan pengolahan makanan merupakan sumber utama pendapatan. Pembuatan makanan umumnya merupakan strategi bertahan hidup orang miskin untuk memperoleh penghasilan. Hal ini bisa mereka lakukan sebagai buruh atau pemimpin usaha kecil dimana buruh tidak sepenuhnya hidup dari kerja mereka karena sifat kerjanya tidak tetap. Nasib usaha mereka tergantung pada kekuatan modal usaha tersebut untuk membeli bahan-bahan,

tergantung pula pada permintaan pembeli (yang rendah dimasa paceklik) dan jaringan perdagangan.

Menurut Ken Suratiyah (1994:23), beberapa faktor pendorong masuknya wanita di pedesaan pada kegiatan industri kecil/rumah tangga pangan dalam beberapa penelitiannya adalah (a). Tidak dapat melanjutkan sekolah, (b). Pendapatan suami tidak mencukupi, (c). Mengisi waktu luang, (d). Ingin memperoleh uang sendiri, (e). Tidak ada kesempatan kerja lain dan sebagainya. Faktor-faktor keterbatasan individu adalah yang paling banyak mempengaruhi wanita memasuki pekerjaan yang berupah rendah, tidak memerlukan persyaratan pendidikan dan ketrampilan khusus. Wanita pedesaan terutama yang telah menikah mempunyai banyak peran sehingga fungsi reproduksi dan fungsi sosial di masyarakat cenderung memilih pekerjaan yang tingkat upahnya tidak tergantung masa kerja. Karena tingkat upah yang rendah bukan menjadi permasalahan, yang penting bisa bekerja dan sewaktu-waktu keluar masuk sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

Partisipasi atau keterlibatan ibu rumah tangga dalam kegiatan produksi bolu dapat kita lihat melalui sebuah manajemen produksi. Manajemen produksi menurut Pontas M. Pardede (2005:13) adalah segala bentuk dan jenis pengambilan keputusan mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan dihasilkan, sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan, cara pengolahan, teknik operasi dan produksi yang akan digunakan sampai barang atau jasa tersebut berada ditangan pemakai atau pengguna.

Menurut Sujadi Prawirosentono (1997:5), manajemen produksi mempunyai ruang lingkup merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengangkat petugas dan mengawasi kegiatan produksi. Secara singkat, ruang lingkup manajemen produksi adalah sebagai berikut : Perencanaan produksi, pelaksanaan produksi dan pengendalian produksi.

Melihat ruang lingkup manajemen produksi di atas, dapat dijelaskan bahwa tahapan-tahapan produksi memuat :

a. Perencanaan Produksi

Suatu kegiatan usaha, baik skala kecil atau besar sangat memerlukan perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Pontas M. Pardede (2005:14-18), perencanaan kegiatan pengolahan (kegiatan operasi dan produksi) meliputi :

1) Perencanaan barang dan sumber daya

Kegiatan operasi dan produksi atau kegiatan pengolahan dimulai dari penentuan jenis barang atau jasa yang akan dibuat perusahaan. Penentuan jenis barang atau jasa dapat dilakukan melalui penelitian pasar dan penelaahan kelayakan usaha. Setelah perusahaan menetapkan barang yang akan dibuat maka langkah berikutnya adalah menentukan jenis bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja manusia, dan mesin yang dibutuhkan dalam kegiatan pengolahan. Penentuan tersebut harus disesuaikan dengan tingkat

mutu yang direncanakan untuk barang atau jasa yang akan dibuat. Setelah jenis bahan baku, tenaga kerja manusia dan mesin yang dibutuhkan sudah ditetapkan maka perusahaan harus merencanakan sumber pengadaan masing-masing. Penentuan sumber ini dilakukan dengan mempertimbangkan harga, mutu dan penawarannya.

2) Perancangan sarana pengolahan

Sebelum perusahaan didirikan, tempat kedudukan sarana pengolahan harus direncanakan terlebih dahulu, mulai dari tempat pengolahan, tempat sarana pendukung seperti kantor dan gudang, perencanaan tata letak pusat-pusat kerja yang diikuti dengan pengukuran daya kerja. Pengukuran daya kerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa jumlah, jenis serta rancangan tata letak berbagai peralatan dan pusat kerja dapat memenuhi sesuai kebutuhan yang direncanakan.

3) Perencanaan kegiatan pengolahan.

Setelah jenis barang atau jasa yang akan dibuat ditetapkan, selanjutnya harus ditentukan jumlah setiap jenis yang akan dibuat dalam setiap jangka waktu. Selain itu juga harus direncanakan urutan pelaksanaan berbagai pekerjaan supaya mempersingkat waktu. Dalam perencanaan pengolahan juga menentukan suatu norma atau pedoman pekerjaan. Norma ini menunjukkan jumlah barang atau jasa yang seharusnya dihasilkan, misal dalam satu jam

kerja. Norma ini akan menjadi kemampuan seluruh sumberdaya yang dimiliki dan diunakan perusahaan. Jika norma ini tidak tercapai maka perusahaan harus memperbaiki rancangan pekerjaan yang digunakan.

b. Pelaksanaan Produksi

Pelaksanaan kegiatan produksi adalah penggunaan tenaga kerja manusia dan alat untuk mengolah bahan baku dan bahan pembantu yang tersedia untuk membuat barang atau jasa. Kegiatan pengolahan dilaksanakan sesuai dengan teknologi yang digunakan dalam pengolahan tersebut. Jenis teknologi juga menentukan daya kerja perusahaan yaitu jumlah barang yang dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah tertentu bahan baku dan tenaga kerja serta sejumlah jam kerja tertentu (Pontas M. Pardede, 2005:17).

Sedangkan pelaksanaan produksi menurut Sirod Hantoro (1998:2-3) adalah suatu metode atau cara tahapan-tahapan untuk menciptakan atau membentuk suatu barang dari bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menggunakan peralatan atau mesin sehingga barang tersebut mempunyai nilai tambah.

Jenis pelaksanaan produksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- 1) Perusahaan dengan proses produksi terus menerus (*continous process atau continous manufacturing*). Perusahaan ini beroperasi secara terus menerus untuk memenuhi stok pasar (kebutuhan pasar).

2) Perusahaan dengan proses produksi terputus-putus (*intermitten process* atau *intermitten manufacturing*). Perusahaan ini memproduksi secara terputus-putus menggantungkan proses produksinya pada pesanan (*job order*).

c. Pengendalian Produksi

Pengendalian produksi menurut Sirod Hantoro (1998:7) adalah suatu kegiatan untuk mengkoordinir atau mengarahkan aktivitas-aktivitas yang ada di industri agar waktu penyelesaian yang ditentukan terlebih dahulu dapat dengan seefektif dan efisien. Pengendalian produksi menurut Hendara Kusuma (2004:1) dimaksudkan untuk mendayagunakan sumber daya produksi (fasilitas produksi, tenaga kerja dan bahan baku) yang terbatas secara efektif, terutama dalam usaha memenuhi permintaan konsumen dan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Pengendalian produksi merupakan tahapan pengawasan dalam proses perencanaan, pengolahan hingga barang sampai kepada konsumen (Sujadi Prawirosentono, 1997:5).

Menurut Pontas M. Pardede (2005:18), meskipun perusahaan sudah melaksanakan kegiatan pengolahan, bukan berarti perencanaan tidak lagi diperlukan. Selama masa pelaksanaan kegiatan pengolahan tersebut, perusahaan harus secara terus menerus mengusahakan efisiensi dan keberhasilan kegiatan itu sendiri. Efisiensi dan keberhasilan tersebut dapat ditingkatkan, antara lain melalui pengelolaan yang baik atas bahan baku, tenaga kerja dan teknologi

yang digunakan. Keberhasilan kegiatan pengolahan juga dapat ditingkatkan melalui perencanaan dan pengendalian mutu yang meliputi mutu barang yang dihasilkan, evaluasi terhadap produk yang dihasilkan dan pengembangan usaha. Oleh sebab itu, sejak penentuan jenis barang atau jasa yang akan dibuat hingga barang atau jasa tersebut siap dipasarkan, pengawasan mutu harus dilaksanakan pada setiap kegiatan. Tingkat mutu yang dikandung oleh barang harus disesuaikan dengan tingkat mutu yang diinginkan oleh pemakai di pasar yang menjadi sasaran perusahaan. Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa dalam sebuah usaha harus bisa menciptakan efisiensi dan keberhasilan kegiatan itu sendiri supaya hasil yang dicapai bisa maksimal dan sesuai dengan perencanaan.

Menurut Sirod Hantoro (1998:8), kegiatan pengendalian produksi atau pengawasan produksi agar dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna dan efektif harus dapat melakukan sesuai dengan fungsinya, seperti:

1) *Routing*

Routing merupakan kegiatan yang menentukan dan mengatur mengenai urutan kerja yang logis dan sistematis serta ekonomis.

2) *Penjadwalan*

Pejadwalan merupakan pengaturan dan penentuan kegiatan operasi dengan mengetahui kapan dimulai kapan pekerjaan harus selesai.

3) *Dispatching*

Kegiatan-kegiatan dalam *dispatching* tersebut adalah penyampaian perintah kepada bagian produksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan urutan kerja.

4) *Follow Up*

Follow up dimaksudkan untuk meneliti semua aspek yang ada dalam industri yang mengakibatkan kemacetan dan proses produksi tidak lancar sehingga dapat dicari solusinya.

Pengawasan atau pengendalian produksi memberikan keuntungan:

- 1) Membantu tercapainya operasi produksi sependek mungkin dengan kualitas sebaik-baiknya.
- 2) Memberikan bantuan merencanakan prosedur pengerjaan yang sistematis, dan membuat prosedur-prosedur pembuatan komponen mesin menjadi sederhana.
- 3) Menjaga agar tersedia pekerjaan atau kerja yang dibutuhkan pada titik minimum sehingga dengan demikian dapat dilakukan penghematan (Sirod Hantoro, 1998:7).

B. Kerangka Berfikir

UKM bolu di Wonolelo merupakan salah satu unit usaha kecil yang memproduksi bolu. Dari usaha tersebut, dapat kita lihat berbagai kegiatan yang banyak dan sangat kompleks mengenai produksi bolu. Namun secara garis besar, kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kegiatan besar yaitu perencanaan produksi, pelaksanaan produksi dan pengendalian produksi.

Kegiatan UKM bolu di Wonolelo merupakan kerja sama antara ibu dan bapak. Tetapi, peran atau partisipasi ibu dalam kegiatan UKM bolu ini akan lebih ditekankan, karena melihat peran ibu yang ganda yaitu peran domestik dan publik. Keterlibatan wanita khususnya ibu rumah tangga dalam UKM bolu dapat memberikan gambaran bahwa ibu rumah tangga yang selama ini masih dianggap pendamping suami tidaklah benar. Oleh karena itu, sudah sepantasnya hasil kerja keras mereka dalam membantu mencari nafkah patut dihargai.

Partisipasi ibu dalam kegiatan UKM bolu yang dilihat dari aspek perencanaan produksi, pelaksanaan produksi dan pengendalian produksi dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bukti bahwa hasil kerja mereka perlu diakui keberadaannya dan tidak hanya sebagai wacana. Pendapatan tambahan yang diusahakan lewat aktivitas ekonomi sebagai pemilik UKM bolu ini tentu saja akan memberikan peranan terhadap tingkat kesejahteraan atau kondisi keluarga yang tentunya lebih baik.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi ibu rumah tangga dalam kegiatan UKM bolu di Wonolelo, Pleret, Bantul, DIY yang dilihat dari aspek perencanaan produksi, pelaksanaan produksi dan pengendalian produksi.

